

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi bahwa unsur penyelenggaraan pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah. Perubahan keempat UUD Tahun 1945 menyatakan jelas mengenai bentuk dan susunan pemerintahan daerah dalam kerangka negara Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) menyebutkan, “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur undang-undang.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang ditindak lanjuti dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing, daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa dalam Bab III Pasal 5 Standar , Pelayanan Minimal Desa, bahwa ada beberapa pelayanan yaitu, penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan, penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertahanan, pemberian surat keterangan, penyederhanaan pelayanan dan pengaduan masyarakat.

Bangsa Indonesia selalu dihadapkan kepada masalah sebagaimana membangun pemerintahan yang baik, dan bersih. Aparatur diharapkan dapat menjadi motivator, yang diharapkan pula tidak hanya mampu menjalankan perannya sebagai aparatur, tidak hanya mengedepankan kemampuan menyelenggarakan tugas dan fungsi organisasi, tetapi juga mampu merespon aspirasi publik kedalam kegiatan dan program organisasi serta mampu melahirkan inovasi baru yang bertujuan untuk mempermudah kinerja organisasi dan sebagai bagian dari wujud aparat yang professional.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Gambar 1.1

TABEL DATA DESA SE KABUPATEN SUMEDANG

NO	KECAMATAN	DESA/JUMLAH
1	WADO	10
2	JATINUNGGAL	9
3	DARMARAJA	12
4	CIBUGEL	7
5	CISITU	10
6	SITURAJA	15
7	CONGGEANG	12
8	PASEH	10
9	SURIAN	9
10	BUAH DUA	14
11	TANJUNG SARI	12

Dilanjutkan

		Pindahan
12	SUKASARI	7
13	PAMULIHAN	11
14	CIMANGGUNG	11
15	JATINANGOR	12
16	RANCAKALONG	10
17	SUMEDANG UTARA	PADASUKA
		MULYASARI
		GIRIMUKTI
		MEKARJAYA
		MARGAMUKTI
		SIRNAMULYA
		KEBONJATI
		JATIHURIP
		JATIMULYA
	RANCAMULYA	
18	SUMEDANG SELATAN	10
19	GANEAS	8
20	TANJUNG KERTA	12
21	TANJUNG MEDAR	9
22	CIMALAKA	14
23	CISARUA	7
24	TOMO	9
25	UJUNG JAYA	9
26	JATIGEDE	11
JUMLAH KESELURUHAN		270

Sumber Data : Profil Desa SeKabupaten Sumedang ,2016

Gambar 1.1 di atas dapat disimpulkan bahwa data desa se-Kabupaten Sumedang itu ada 26 Kecamatan dan 270 Desa , dari 270 Desa penulis tertarik meneliti di Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang utara, dikarenakan permasalahan di Desa Rancamulya masih membutuhkan peningkatan profesionalisme aparatur pemerintahan desanya.

Desa salah satu bentuk daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang merupakan ujung tombak dalam pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten atau kota tercermin pada keberhasilan

pemerintahan di desa, keberhasilan itu tidak akan pernah tercapai tanpa adanya sebuah perencanaan yang merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan yang ingin di capai.

Desa Rancamulya merupakan desa yang terletak di Kabupaten Sumedang, Kecamatan Sumedang Utara, Provinsi Jawa Barat. Suku bangsa mayoritas dari warga Desa Rancamulya hampir 95% Suku Sunda. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan untuk melanjutkan program-program yang di nilai sukses dan berhasil pada periode kepemimpinan kepala desa sebelumnya, menuntaskan dengan lebih cepat dan lebih baik pada program dan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh periode kepala desa sebelumnya namun belum selesai seluruhnya, mendukung ide-ide pembangunan yang lahir dari warga masyarakat.

Visi dari Desa Rancamulya , Berdasarkan kondisi sampai saat ini dan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki maka visi pembangunan Desa Rancamulya Tahun 2013- 2018 adalah :“ Rancamulya Semanis Madu Sejahtera Maju Agamis Mandiri Produktif ”.

Sejahtera adalah Keadaan masyarakat Desa Rancamulya yang secara hakiki dapat meningkatkan kehidupannya yang di tandai dengan meningkatkannya IPM dan sosial kemasyarakatan. Terwujudnya perpaduan antara kesejahteraan jahiriyah dan batiniyah dan Kesejahteraan yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya.

Maju adalah terwujudnya suatu kondisi masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya yang di tandai dengan adanya peningkatan kualitas dari sumber

daya manusia (SDM) dan pencapaian hasil-hasil pembangunan. Terciptanya masyarakat yang produktif dan berdaya saing dan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dan skill yang terdidik dan terampil.

Agamis adalah Kondisi masyarakat Desa Rancamulya yang tercermin dalam merealisasikan nilai-nilai luhur agama yang diyakininya. Terciptanya masyarakat Desa Rancamulya yang agamis dan toleransi antar umat beragama yang tangguh dan harmonis.

Mandiri adalah suatu kemampuan masyarakat Desa Rancamulya untuk bertumpu pada pengelolaan potensi sumber daya yang berbasis IPTEQ. Mampu mengembangkan potensi-potensi yang ada dan tercapainya kemampuan untuk berdiri sendiri tanpa selalu mengandalkan bantuan.

Produktif adalah kondisi terwujudnya refleksi kemanfaatan sumber daya manusia maupun sumber daya alam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Mampu membuat kreasi dan inovasi baru dan mengembangkan seluruh potensi yang ada menjadi produktif dan bernilai ekonomis juga mengurangi angka pengangguran.

Strategi yang digunakan untuk mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut :

- a. Melanjutkan program-program yang telah di nilai sukses dan berhasil pada periode kepemimpinan kepala desa sebelumnya.

- b. Menuntaskan dengan lebih cepat program dan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh periode kepala desa sebelumnya namun belum selesai seluruhnya.
- c. Mendukung ide-ide pembangunan yang lahir dari warga masyarakat Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang.

Misi merupakan penjabaran dari visi yang mencerminkan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk pencapaian visi yang telah ditetapkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan oleh desa untuk mencapai visi desa, maka misi dari Desa Rancamulya adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mencapai masyarakat mandiri, amanah, bertanggungjawab dan berwawasan kedepan.
- b. Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam tata kelola pemerintahan desa untuk menunjang pelayanan publik (public service) di semua aspek secara cepat, tepat yang makin menjamin kepuasan pelayanan dan partisipasi masyarakat.

Peningkatan kualitas SDM aparat desa sebagai program yang tidak dapat ditawar- tawar kan lagi. Hal tersebut berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang telah di revisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83/84 2016 Tentang pemerintahan desa yang didalamnya mengatur tentang peningkatan aparatur desa. Tingkat pendidikan aparat desa di daerah masih kurang, sedangkan saat ini desa menjadi fokus pembangunan pemerintah karena di desa lah sebagai pusat obyek pembangunan nasional dilaksanakan.

Jadi desa harus bisa mengelola aparatur desa harus mempertanggungjawabkan apa yang pemerintah beri ke desa maka aparatur desa perlu ditingkatkan kualitas SDM melalui Studi lanjut sesuai bidangnya.

Kualitas SDM dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan pemberian kompensasi yang adil termasuk berbagai fasilitas kesejahteraan aparat. Pengembangan sumber daya manusia bahwa kualitas SDM adalah menyangkut dua aspek fisik dan aspek non fisik yang menyangkut kemampuan kinerja,berfikir dan terampilan.

Gambar 1.2

TABEL REKAP JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK PEKERJAAN

No	RW	Tidak Bekerja	Jumlah penduduk
1.	01	144	713
2.	02	111	641
3.	03	99	595
4.	04	112	731
5.	05	394	2.005
6.	06	179	1.101
7.	07	113	695
8.	08	131	908
9.	09	49	383
10.	10	0	1
Jumlah		1.332	7.773

Sumber data : Rekapian Jumlah Penduduk Desa Rancamulya, 2018

Berdasarkan visi dan misi desa rancamulya yang tadi disebutkan sebelumnya bahwa ada terciptanya masyarakat yang produktif dan berdaya saing dan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dan skill yang terdidik dan terampil, tetapi melihat jumlah penduduk dalam kelompok bekerja

ada 1.332 seperti yang dijelaskan gambar 1.2 yang pengangguran sangat tinggi. Karena aparatur pemerintahan belum bisa memenuhi janjinya kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan pembangunan masih rendahnya kemampuan dalam perencanaan, berakibatkan pada kurangnya koordinasi antara output dan implementasi kebijakan kebutuhan masyarakat yang merupakan input dari kebijakan. Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintahan benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil menghasilkan output dan outcomes seperti direncanakan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2007 Pasal 10 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Desa, bahwa Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa didasarkan pada azas relevansi, efisiensi, efektifitas, berkelanjutan, transparan, akuntabilitas, disiplin serta partisipatif. Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas alokasi sumber daya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan.

Pada suatu organisasi dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik efektif dan efisien dengan didukungnya oleh aparatur yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya dan beresifat profesional. Oleh sebab itu menjadi tantangan pada setiap organisasi pemerintah termasuk pemerintahan desa. Strategi yang harus dilakukan yaitu pengelolaan aparatur untuk mewujudkan pelayanan yang optimal untuk pemberdayaan aparatur. Jadi hal ini dapat mengikutsertakan para aparatur disemua kalangan dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah.

Pemberdayaan yang dilakukan aparatur pemerintah akhirnya akan meningkatkan prestasi kerja yang lebih baik, yang pada akhirnya akan meningkatkan organisasi pemerintahan. Program yang dilakukan Desa Rancamulya yaitu peningkatan kapasitas pemerintahan desa dengan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa dengan pelatihan pengelolaan keuangan desa bagi perangkat desa dan pelatihan perencanaan desa pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 peningkatan kapasitas aparatur dan fasilitas kader pemberdayaan masyarakat desa.

Dengan permasalahan yang sebelumnya diadakakan program pelatihan pengelolaan keuangan desa bagi perangkat desa dan peningkatan kapasitas aparatur dan fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat desa masih banyak beberapa kendala yang memang menjadi hambatan bagi kinerja aparatur desa kinerjanya masih belum optimal dan belum efektif

Gambar 1.3

**TABEL LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN
CAPAIAN OUTPUT DANA DESA SAMPAI DENGAN TAHAP II TAHUN
ANGGARAN 2017**

URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CAPAIAN OUTPUT
Bidang Pemberdayaan masyarakat desa			
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga Masyarakat	Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa bagi Perangkat Desa	1 kali	100%
	Pelatihan Perencanaan Desa	1 kali	100%

Sumber Data : Realisasi APBDes Desa Rancamulya Tahun 2017

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2018 adalah :

Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa, dengan indikasi kegiatan : Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;

Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa, dengan indikasi kegiatan:

Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;

Masalah diatas memang penting untuk kita mengevaluasi program aparatur pemerintah desa untuk mengukur sejauh mana kinerjanya dan meningkatkan profesionalismenya. Evaluasi merupakan proses pengumpulan data untuk menentukan sejauhmana dan dalam hal apa , bagaimana tujuan program dapat tercapai untuk meningkatkan profesionalisme aparatur desa.

Evaluasi biasanya ditunjukkan untuk menilai sejauh mana keefektifan guna mempertanggungjawabkan kepada yang berwenang. Evaluasi dapat melihat sejauh mana tujuan tercapai serta untuk melihat sejauh mana kesenjangan antara ekspektasi dengan kenyataan.

Pada kebijakan pemerintah untuk menetapkan pengelolaan pemerintah menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi. Salah satunya untuk mewujudkan pemerintah yang baik dan peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah, baik tingkat pusat maupun tingkat desa. Dalam rangka peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah desa, perlu adanya pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa dengan peningkatan kemampuan dalam pelayanan publik.

Melakukan evaluasi program adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang telah direncanakan. Evaluasi program merupakan bagian dari suatu evaluasi kebijakan, karena program merupakan turunan dari pelaksanaan kebijakan publik. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dengan adanya profesionalisme pegawai agar tugas dan fungsi organisasi dapat tercapai tujuannya sesuai dengan misi secara optimal menurut standar tertentu yang telah diharapkan oleh organisasi itu sendiri maupun para pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat banyak yang sangat mendambakan

pelayanan yang baik dan prima dari pemerintah agar tercipta good governance.

Dengan melandaskan pemikiran terhadap permasalahan yang dihadapi oleh aparatur, maka sebagai upaya untuk memperbaiki berbagai kelemahan dan mengantisipasi perubahan lingkungan maka diperlukan sebuah evaluasi dalam hal pemikiran untuk membangun aparatur yang lebih handal dan professional dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara kegiatan pembangunan dan penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kantor Desa Rancamulya Kabupaten Sumedang, yaitu dengan judul :

*Evaluasi Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan
Desa Rancamulya Kabupaten Sumedang*

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus penelitian meliputi Evaluasi Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Desa Rancamulya Kabupaten Sumedang. Lokus penelitian ini ada di Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang.

Di Desa Rancamulya ada beberapa permasalahan atau kendala yang harus ditangani dengan baik sehingga untuk memecahkan permasalahan ini, penelitian ini berusaha memahami beberapa aspek mengenai permasalahan tentang program perencanaan desa dan program

pengelolaan pengembangan kapasitas dalam fasilitas pemberdayaan masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Beberapa pertanyaan utama yang akan dicoba dijawab melalui penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana profesionalisme kerja dalam program pengelolaan keuangan aparatur desa yang mempengaruhi sumber daya ?
2. Bagaimana pengelolaan dan pengembangan program kapasitas aparatur dalam fasilitas pemberdayaan masyarakat?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan diatas, dapat diketahui tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan sejauh mana profesionalisme kerja dalam program aparatur desa yang mempengaruhi sumber daya.
2. Untuk menjelaskan sejauh mana pengelolaan dan pengembangan program kapasitas aparatur dalam fasilitas pemberdayaan masyarakat.

E. Kegunaan/Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan kegunaan bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak

langsung. Oleh karena itu, penulis menggolongkan manfaat dan kegunaan penelitian ini menjadi dua, yakni secara teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis

Dapat mengetahui Evaluasi Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Desa Rancamulya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan pemahaman baru bagi penulis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan bagi pembaca tentang fenomena Profesionalisme Aparatur Pemerintahan di Desa Rancamulya .

2. Secara Praktis

a. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dalam pengembangan intelektual, dibidang akademis sehingga mampu menerapkan langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai calon aparatur Pemerintahan.

b. Bagi instansi,

Penelitian ini di harapkan menjadi bahan pemikiran dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja aparatur negara secara efisien dan efektif.

c. Bagi umum,

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan kaum terdidik kepada masyarakat luas yang ingin mengetahui upaya dan kinerja yang dilakukan aparatur Pemerintahan.

F. Kerangka Pememikiran

Evaluasi program biasanya ada tahapan tertentu yaitu sebelum program pada proses pelaksanaan atau setelah program dilaksanakan dengan membandingkan keadaan yang nyata dengan keadaan yang diharapkan pada suatu program tersebut. Maka dalam suatu evaluasi penting adanya suatu tujuan atau keadaan yang diharapkan dan dengan tujuan tersebut dinilai dengan melakukan evaluasi.

Dalam penilaian evaluasi bisa saja tidak merubah yang direncanakan, oleh karenanya evaluasi yang dilaksanakan dengan baik apabila programnya dicantumkan tujuan yang jelas sehingga mampu mendefinisikan hasil yang dicapai.

Evaluasi ini untuk memperbaiki program perencanaan aparatur desa dan program pengelolaan dan pengembangan kapasitas dalam fasilitas pemberdayaan masyarakat. Dalam kebijakan untuk menetapkan pengelolaan pemerintah tersebut untuk menuju tata kelola yang baik . Salah satunya untuk mewujudkan pemerintah yang baik dan reformasi birokrasi adalah peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah, baik tingkat pusat maupun tingkat desa. Peningkatan profesionalisme aparatur dalam rangka adanya pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa dengan peningkatan kemampuan dalam pelayanan publik.

Dalam permasalahan pelaksanaan pemerintah yang baik untuk kedepanya diterapkan secara optimal dilingkungan kerja masing-masing , peningkatan kapasitas dalam kewenangan desa UU 32/2004 & PP 72/2005 , urusan

pemerintah yang sudah ada berdasarkan asal-usul desa , urusan yang menjadi kewenangan kabupaten , tugas pembantu pemerintah, urusan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Dalam SDM perangkat desa dengan adanya kondisi yang perlu ditingkatkan kekhawatiran bahwa SDM perangkat desa tidak dapat mengikuti program yang ada, yang menjadi penting dan utama adalah adanya pembekalan, pendidikan, pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas professional sesuai bidangnya tugas masing-masing.

Evaluasi Program Dunn (2000:608) istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjukkan pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan Penilaian (*assment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesipik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi.

Dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan digunakan kriteria-kriteria umum yang dimaksudkan untuk memberarahkan bagi evaluator. Kriteria-kriteria yang dirumuskan akan dapat dijadikan sebagai salah satu patokan dalam

menentukan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. Dunn menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan yang meliputi 6 (enam) tipe sebagai berikut:

a. Efektifitas (effectiveness)

Berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.

b. Efisiensi (Efficiency)

Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.

c. Kecukupan (Adequacy)

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang membutuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

d. Pemerataan/Kesamaan (Equity)

Indikator ini erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-

kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan atau pelayanan publik kadang-kadang direkomendasikan atas dasar kriteria kesamaan.

Kriteria kesamaan erat kaitannya dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan sumber daya dalam masyarakat.

e. **Responsivitas (Responsiveness)**

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan), masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya dituangkan dari adanya suatu kebijakan.

f. **Ketepatan (Appropriateness)**

Kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi

dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Dengan melandaskan pemikiran kepada pendapat di atas maka menurut penulis perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan fenomena tersebut, dan pada akhirnya diharapkan hasil yang diperoleh dapat meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah khususnya di Desa Rancamulya Kabupaten Sumedang.



Kriteria Evaluasi Kebijakan ada 6 (enam), Yaitu Dimensi :

1. Efektifitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Pemerataan
5. Responsivitas
6. Ketepatan

Sumber : William N. Dunn , 2000: 608

Penelitian Dilakukan Tahun 2018

G. Proposisi

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan diatas , penulis menyusun Proposisi yaitu Evaluasi Program Peningkatan Aparatur Pemerintahan Desa Rancamulya Kabupaten Sumedang ditentukan oleh enam kriteria evaluasi kebijakan dan Profesionalisme yaitu Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan.

